



PAPER – OPEN ACCESS

## Analisis Kudeta Militer Turki Tahun 2016

Author : Sri Kurnia Sari dan A Arifin  
DOI : 10.32734/lwsa.v3i3.911  
Electronic ISSN : 2654-7066  
Print ISSN : 2654-7058

*Volume 3 Issue 2 – 2020 TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



## Analisis Kudeta Militer Turki Tahun 2016

Sri Kurnia Sari, A Arifin

*Program Studi Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara*

kurniaram7@gmail.com, rifin83@yahoo.com

### Abstrak

Pada 15 Juli 2016 terjadi Kudeta Militer terhadap pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan. Walaupun kudeta gagal, bukan suatu keuntungan bagi Turki, yang mana pemerintah berupaya meningkatkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial di Turki. Ketika peristiwa kudeta berhasil, kurang lebih pilihannya adalah pemerintahan baru atau sebagian baru, atau menggantikan struktur kekuasaan sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan adalah faktor apa melatarbelakangi peristiwa kudeta. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini menggunakan Teori sebab-sebab kudeta yang dirumuskan Moore (1999) yakni Sebab Kudeta Akut dan Kronik dengan sejumlah aspek dan variabel yang terkait dengan kondisi sosial dan politik Turki sebelum kudeta terjadi. Mulai dari krisis sosial, politik, konflik hingga menelaah karakteristik Angkatan Bersenjata Turki (Turk Silahlı Kuvvetler/TSK) serta sejarah kudeta di Turki sebelumnya dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil analisis ini menyimpulkan bahwa faktor yang menjadi latarbelakang kudeta militer Turki 2016 : pertama, Faktor Krisis Sosial-Politik Domestik yang meliputi gelombang demonstrasi The Gezi Park Protester Maret-Agustus 2013, konflik antara pemerintah Turki dengan suku Kurdi yang memuncak pada tahun 2015 hingga Juli 2016, dan konflik antara dua kelompok besar antara AKP-Erdogan (Presiden Turki sekarang) dan Gulenist yang dipimpin oleh Fetullah Gulen. Kedua, faktor historis yaitu pengaruh dari peristiwa kudeta yang telah dialami sebelumnya.

*Kata Kunci* : Kudeta Militer; Angkatan Bersenjata Turki, Krisis Sosial-Politik; Adalet Ve Kalkina Partisi/AKP; Gulenist;

### 1. Pendahuluan

Kudeta dalam perspektif demokrasi merupakan sebuah penyakit kronis yang ingin dihilangkan dari sistem politik. Demokrasi sebagai sebuah mekanisme politik menghendaki proses transformasi kekuasaan yang dilakukan melalui proses politik yang tidak mempergunakan instrumen kekuasaan. Sehingga apapun alasan di balik kudeta, baik yang klise seperti demi kesejahteraan umum, penegakan hukum dan alasan lainnya, ditolak keberadaannya.

Secara umum, kudeta dapat dikatakan bentuk perubahan rezim dalam catatan jika kudeta yang dilakukan berhasil. Ketika kudeta berhasil, pemerintahan baru atau sebagian baru, menggantikan struktur kekuasaan sebelumnya (Moore, 1999). Di banyak negara, kudeta merupakan fenomena reguler dan menjadi penyebab perubahan rezim. Hampir sebagian besar negara telah merasakan peristiwa politik tersebut, baik yang berhasil maupun tidak berhasil. Sebuah negara yang mengalami kudeta dapat dikatakan telah memiliki esensi pengalaman dan proses bernegara tersendiri dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa politik lainnya.

Begitu juga dengan Turki, proses bernegara yang dialami Turki tentu banyak sekali terjadi perubahan dan perkembangan. Selain adanya perkembangan dan perubahan demi perubahan, juga diwarnai dengan gejolak, baik dari segi masyarakat, ekonomi, dan khususnya dalam proses politik. Turki, paling tidak sudah sering mengalami kudeta sejak Turki menyandang status sebagai negara Republik Turki yang mana dari keseluruhan kudeta tersebut juga melibatkan elit dan pejabat tinggi militer Turki (Turk Silahlı Kuvvetleri/Angkatan Bersenjata Turki/TSK). Pada praktiknya, militer telah menjadi bagian utama elit kekuasaan di Turki.

Secara historis, Angkatan Bersenjata Turki (Turk Silahlı Kuvvetleri /TSK) telah memainkan peran penting dalam pembentukan republik. Bahkan dalam perkembangannya, militer telah beberapa kali melakukan kudeta. Tradisi kemiliteran Turki tumbuh dari pengalaman sejarah yang panjang dan terus meningkat pada abad ke-19 yang berdampak penting pada perkembangan politik di awal abad ke-20 (Tareq dan Jacqueline Ismael, 2011).

Kemudian, muncul fenomena partai dan politikus Islamis, ditandai dengan kehadiran Adalet Ve Kalkina Partisi (Partai Keadilan Dan Pembangunan/AKP). Salah satu elit yang populer adalah Recep Tayyip Erdogan. Dukungan terhadap AKP pada pemilu-pemilu di Turki sejak 2002 (sebanyak 34,28%) terus meningkat dan menunjukkan kinerja yang progresif. Selanjutnya dukungan suara meningkat menjadi 47% pada pemilu 2007 dan 49% pada pemilu 2011 (Alfian, 2018). Hal ini menunjukkan semakin kuat posisinya dalam pemerintahan multipartai dengan satu partai dominan (AKP). AKP tidak pernah kehilangan kekuasaan, hingga kini kebijakan-kebijakan politik AKP terus mewarnai perpolitikan Turki.

Selain itu, Turki juga mengalami berbagai konflik persoalan dalam negeri. Konflik terkait dengan isu identitas suku Kurdi dalam nasionalisme Turki. Perlawanan Kurdi sudah ada sejak lama (Sahide, 2013). Konflik antara Turki dan kelompok pemberontak Kurdi juga merupakan persoalan yang menjadikan salah satu akar perseteruan antara pimpinan AKP Erdogan dengan Kelompok Gulen. Kemudian di penghujung 2013, terkuak skandal korupsi di Turki yang melibatkan pejabat birokrasi negara. Pembongkaran skandal korupsi ini dilakukan oleh Financial Crimes and Battle Againsts Criminal Income, Direktorat Keamanan Istanbul. Sejak pembongkaran kasus korupsi, Erdogan menuding Kelompok Gulenist terlibat dalam pembongkaran kasus tersebut dengan alasan sejak awal Kelompok Gulenist bersikap melawan korupsi dan ketidakadilan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Erdogan (Kuncahyono, 2018).

Mustafa Gurbuz, seorang peneliti bidang politik Turki menggambarkan kondisi politik di Turki sejak pembongkaran kasus korupsi tersebut sebagai 'musim dingin yang panjang', sebab iklim politik pada saat itu sedang berjalan memburuk. Kemudian, terjadi demonstrasi masyarakat sipil yang dikenal dengan Peristiwa Taman Gezi (The Gezi Protester), di Provinsi Istanbul yang dimulai sejak tanggal 28 Mei 2013 hingga akhir Agustus 2013. Atas dua permasalahan tersebut, pemerintah Turki berusaha menghentikan investigasi korupsi dengan mengambil langkah kontroversial yaitu mengurangi kekuasaan kehakiman (pengadilan), mengontrol media, serta membatasi akses internet (Kuncahyono, 2018).

Pada saat 15 Juli 2016 terjadi upaya kudeta militer guna menumbangkan rezim Erdogan yang tengah memegang kendali kekuasaan. Pelaku kudeta mengklaim telah sepenuhnya mengambil alih administrasi negara untuk mengembalikan tatanan konstitusional, hak asasi manusia dan kebebasan, aturan hukum dan keamanan umum yang yang buruk di bawah Pemerintahan Erdogan. Para pelaku kudeta mengebom gedung lembaga-lembaga penting negara, seperti Gedung Parlemen, Istana Beylerbeyi (Istana Kepresidenan), Balai Staf Umum, markas Besar Polisi dan markas Organisasi Intelijen Nasional (MIT) dengan helikopter dan pesawat F-16. Bersamaan dengan institusi-institusi yang memiliki nilai strategis ini, 241 warga sipil yang menentang para pelaku kudeta terbunuh dan 2195 terluka akibat pengeboman. Begitu juga di wilayah Istanbul, tank memblok lalulintas di jembatan Bogazici (Bosphorus) dan mengepung Bandara Attaturk serta menguasai menara kontrol bandara.

Ketika kudeta berhasil, pemerintahan baru atau sebagian baru, menggantikan struktur kekuasaan sebelumnya. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kudeta tersebut bisa terjadi atau bisa dikatakan faktor apa yang melatarbelakangi peristiwa kudeta tersebut. Sama halnya dengan peristiwa kudeta militer yang terjadi di Turki pada 15 Juli 2016. Tentu hal ini menjadi satu ketertarikan tersendiri mengapa pihak militer begitu 'murah tenaga' atau sering sekali melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil di Turki. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis jurnal faktor-faktor kudeta militer Turki tahun 2016.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Jurnal ini menggunakan data sekunder dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti dokumen negara, statistik dan laporan lembaga resmi, Jurnal Internasional, artikel internasional, buku cetak dan elektronik serta lembaga penelitian internasional maupun lokal. Penelitian ini juga menggunakan dua pendekatan dalam menganalisa. Pertama, dimulai dengan pertanyaan penelitian (rumusan masalah) kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan data sekunder yang relevan. Kedua, dimulai dengan mengumpulkan data sekunder, lalu menelaahnya untuk mencermati variabel-variabel (aspek-aspek) apa saja yang ada dalam data tersebut untuk kemudian dihubungkan berbagai aspek (variabel) lainnya.

## **3. Kajian Pustaka**

Moore (1999) mengklasifikasi sebab-sebab kudeta kedalam 2 (dua) macam yaitu Penyebab Kudeta Akut dan Kronik. Sebab kudeta akut yaitu kudeta tersebut terjadi berdampingan dengan asal usul kudeta itu sendiri, dan dapat dilihat sebagai bagian dari proses yang secara langsung menimbulkan kudeta itu sendiri. Adapun faktor yang menjadi variabel penyebab kudeta akut seperti peran ketidakpuasan militer (grievances) di dalam militer sebagai sumber keinginan menentang pemerintahan sipil, krisis politik domestik sebagai pemicu kesempatan untuk melancarkan kudeta, ancaman militer dari luar negeri dapat menciptakan kesempatan bagi orang-orang yang berniat melakukan kudeta untuk merebut kekuasaan.

Penyebab kudeta kronik yaitu karakter ekonomi suatu negara, yang mana jika ekonomi ekspor negara bersifat monolitik (hanya dikuasai oleh entitas tertentu), secara hipotesis meningkatkan kemungkinan kudeta. Kemudian, sentralisasi kekayaan yang mana jika kekayaan sangat berpusat, resiko kudeta secara hipotesis meningkat. Legitimasi pemerintahan sipil yang lemah juga termasuk penyebab kudeta kronik. Jika masyarakat sipil yang kuat, kudeta tampaknya kecil kemungkinan akan terjadi. Terakhir, adapun faktor historis yang menjadi penyebab kudeta kronik, yakni kudeta sebelumnya. Kudeta sering menimbulkan kudeta lainnya. Alasannya adalah adanya kudeta mungkin merupakan indikator kondisi masyarakat yang mempromosikan munculnya kudeta. Faktor-faktor yang menjurus ke arah kudeta akan tetap bertahan dan memberikan kemungkinan bagi terjadinya kudeta selanjutnya.

## 4. Pembahasan

### 4.1. Sistem pemerintahan Turki

Republik Turki (Turkiye Cumhuriyeti) baru-baru ini menjadi salah satu negara yang cukup populer di kancan internasional terutama di kawasan Timur Tengah. Saat ini dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan, sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan berdasarkan Konstitusi 2017. Turki telah melakukan referendum terhadap konstitusi 1982 pada tanggal 16 April 2017 yang diinisiasi oleh rezim Erdogan. Pada referendum 2017, terdapat perubahan yang secara signifikan merupakan transformasi sistem pemerintahan Turki dari sistem parlementer menjadi sistem presidensial (Karim, 2018).

Turki menganut prinsip *the separation of powers* yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Ketika sistem presidensial diterapkan, secara otomatis memberikan Presiden/Cumhurbaskani (yang merupakan kepala negara dan pemerintahan) kekuasaan penuh di lembaga eksekutif. Semua kekuasaan Perdana Menteri dan kabinetnya juga dihapuskan dan ditransfer langsung ke Presiden, yang terpilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dengan batasan 2 periode. Recep Tayyip Erdogan adalah presiden pertama Turki, yang terpilih melalui pemilihan langsung pasca Konstitusi Turki yang baru (Karagoz, 2017).

Lembaga legislatif Republik Turki adalah unikameral yaitu Grand National Assembly of Turkey (Turkiye Buyuk Millet Meclisi/TBMM) atau Majelis Nasional Turki yang berjumlah 600 perwakilan dengan persyaratan umur kelayakan menjadi anggota parlemen adalah 18 tahun. Sedangkan lembaga yudikatif terdiri dari 13 anggota dengan rincian 4 hakim dipilih oleh Presiden, 7 hakim dipilih oleh TBMM sedangkan 2 Hakim berasal dari Menteri Kehakiman. Dewan Hakim dan Jaksa Agung Turki adalah badan utama yang bertanggung jawab untuk memastikan integritas peradilan, dan menentukan penerimaan hakim profesional dan penugasan pengadilan.

### 4.2. Gambaran Umum Militer Turki

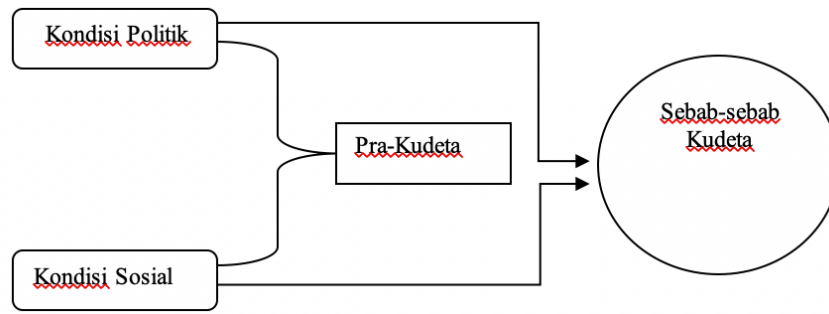
Sejarah bangsa Turki merupakan historis yang dibentuk dan dikembangkan bersama dengan tatanan politik dan militer terdahulu. Turki, yang mengabdikan diri pada militer, membuktikan kepada dunia bahwa mereka adalah bangsa tentara. Orang Turki tidak pernah menganggap militer sebagai profesi khusus karena setiap orang Turki dianggap dilahirkan sebagai pejuang yang gagah berani sejak masa bangsa Turki di Asia Tengah. Seperti yang tertulis di monumen Gokturk, gagasan bahwa misi militer diberikan oleh Tuhan menjadi prinsip utama bangsa Turki.

Secara historis, Angkatan Bersenjata Turki (Turki Silahlı Kuvvetleri/TSK) telah beberapa kali melakukan kudeta yaitu pada tahun 1960, 1971, 1980, 1997 (Alfian, 2015) dan terakhir terjadi pada tahun 2016. Secara umum, militer melakukan kudeta tersebut mengganggu pemerintahan sipil lemah dan gagal mengatasi kekerasan-kekerasan politik yang masif, sehingga militer tergerak melakukan penyelamatan terhadap demokrasi dan melindungi karakter sekuler negara. Konstitusi-konstitusi pasca kudeta memberi otonomi yang tinggi bagi militer, meskipun pada dasarnya pemilu tetap berlangsung, militer terus membayangi siapapun yang memerintah (Burak, 2011).

Angkatan Bersenjata Turki (Turk Silahlı Kuvvetleri/TSK) terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Pasukan Khusus dan Gandarmerie. Sejak Republik Turki berdiri, Mustafa Kemal Atatürk melarang kegiatan politik para perwira yang aktif melalui peraturan Kode Etik Militer No. 1632 Tahun 1930. Namun, setelah kudeta pada tahun 1960, Komite Persatuan Nasional (MBK) membentuk Undang-Undang Angkatan Bersenjata Turki (TSK) di tahun 1961 untuk melegitimasi intervensi militer dalam politik. Seiring perkembangan politik dewasa Turki, telah disahkan perundang undangan tentang kedisiplinan militer pada tahun 2013. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa, anggota militer yang terlibat aktivitas yang dimotivasi politik dan ideologi dikenai sanksi pemecatan. Perkembangan selanjutnya, pada pertengahan tahun 2013, parlemen Turki merivisi Pasal 35 UU Internal Militer, dimana tugas Angkatan Bersenjata Turki adalah untuk melindungi dan menjaga tanah air dan Republik Turki sebagaimana ditetapkan oleh konstitusi. Kemudian, Parlemen mengubah pasal tersebut menjadi bahwa, tugas Angkatan Bersenjata adalah untuk melindungi tanah air Turki terhadap ancaman dan bahaya datang dari luar negeri, untuk menjamin penguatan dan pemeliharaan kekuatan militer dengan mengedepankan pencegahan dan membantu perdamaian Internasional (Alfian, 2018).

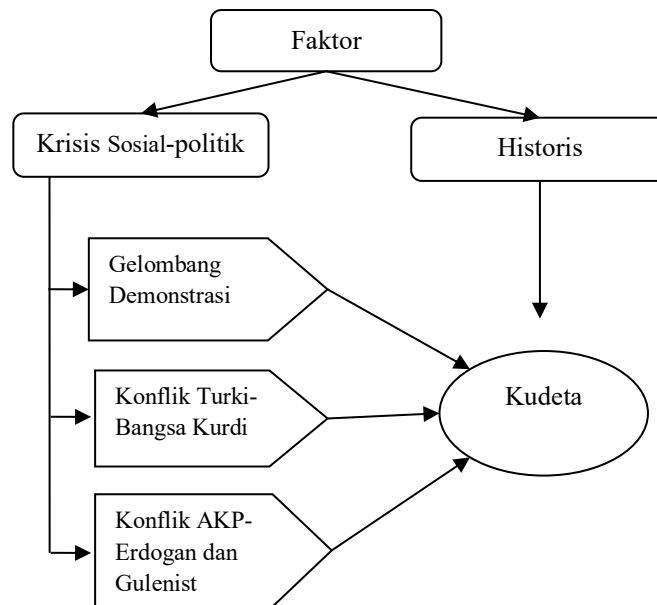
Bagi masyarakat Turki, kudeta militer bukanlah hal yang baru. Sejarah politik Turki penuh dengan kudeta dan upaya kudeta. Kudeta militer di Turki terjadi pada hari Jumat tanggal 15-16 Juli 2016 telah memecah ketenangan masyarakat Turki ketika pukul 10 malam waktu setempat menyaksikan suatu peristiwa yaitu upaya kudeta terhadap pemerintahan sipil. Peristiwa pengambilalihan kekuasaan secara tidak lazim oleh militer ini, sudah yang ke-5 kalinya dialami oleh negara Turki. Berdasarkan laporan yang dipublikasi oleh Pemerintah Turki melalui Juru Bicara Negara Ibrahim Kalin, bahwa Kudeta militer dilakukan oleh a small military junta linked to the Gulenist (Afian, 2018).

5. Analisis



Gambar 1. Alur Pemikiran

Berdasarkan Teori sebab-sebab kudeta diatas, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kudeta militer di Turki tahun 2016 disajikan pada Bagan 2 di bawah ini.



Gambar 2. Hasil Analisis

5.1. Krisis Sosial dan Politik Domestik

Krisis politik domestik sebagai faktor pemicu kesempatan untuk melancarkan kudeta. Menurut Moore (1999), pemicu kudeta yang dilatarbelakangi oleh krisis politik domestik sebagai penyebab kudeta akut. Karena, kudeta tersebut terjadi dan dapat dilihat sebagai bagian dari proses yang secara langsung menimbulkan kudeta itu sendiri. Kudeta Militer yang terjadi di Turki pada tahun 2016 sebagai representasi faktor Kudeta Akut yang dipicu oleh krisis politik dalam negeri (domestik). Krisis sosial-politik yang dialami Turki meliputi:

Pertama, gelombang demonstrasi besar di Turki terjadi di Taman Gezi, Istanbul tahun 2013. Aksi ini disebut juga The Gezi Park Protest yang dimulai sejak 28 Mei 2013, sebagai respon penolakan sekelompok aktivis lingkungan diantaranya Taksim Dayanışması (Taksim Solidarity) untuk menghentikan program pemerintah terhadap kebijakan pemerintah yang mengubah Gezi Park yang secara filosofis bagi rakyat Turki memiliki nilai simbolis negara yang dahulunya sebagai barak Militer Taksim di masa Kekaisaran Ottoman menjadi pusat perbelanjaan dan bangunan komersil lainnya. Kebijakan pemerintah tersebut sebagai bagian dari program “Taksim pedestrianization project” yang dikeluarkan pemerintah Turki pada tanggal 31 Oktober 2012. Pada 8 November 2012 Walikota Istanbul saat itu, Kadir Topbas mengumumkan bahwa sebuah pusat perbelanjaan dapat dibangun tepat di Gezi Park, bekas lokasi Barak Artileri Militer Ottoman.

Awalnya, para demonstran (jumlah mereka diperkirakan 50 orang) berkemah di Gezi Park, dalam upaya untuk menghentikan masuknya alat berat (buldoser) dan mencegah pembongkaran taman. Lantas aparat kepolisian mengambil tindakan represif dengan menggunakan semprotan gas, gas air mata dan meriam air untuk mengusir para demonstran. Selanjutnya, massa demonstrasi terus meningkat, juga didukung oleh kekuatan sosial media, semakin memobilisasi lebih banyak orang untuk bergabung. Sebagian besar

pengunjuk rasa adalah pemuda (sekitar 40% dari demonstran berada di kisaran usia 19-25 tahun dan 24% antara 26-30 tahun), 56% demonstran adalah orang-orang berpendidikan tinggi. Aksi ini tidak hanya terjadi di Istanbul tetapi juga di banyak kota Turki lainnya, menyebar ke seluruh provinsi Istanbul (di wilayah lain seperti Besiktas, Sisli, Uskudar, Fatih, Kadikoy dan wilayah lainnya), provinsi Ankara, provinsi Izmir dan provinsi lainnya. Meskipun rencana pembangunan ditunda, protes masih tetap berlanjut di bulan Juni, sementara penyelidikan tentang tindakan refresif polisi terhadap demonstran juga sedang diselidiki. Namun, penyelidikan tersebut terkesan tidak ada perkembangan sehingga pada tanggal 15 Juni para demonstran semakin masif, pada saat itu dianggap sebagai puncak dari bentrokan antara demonstran dengan aparat kepolisian (Precup, 2013). Menurut Kementerian Dalam Negeri Turki sampai akhir Juni 2013, melaporkan setidaknya 2,5 juta orang turut melakukan demonstran di Taman Gezi.

Pada hari-hari berikutnya, eskalasi protes meningkat dan berubah menjadi demonstrasi melawan pemerintahan AKP. Adapun beberapa daftar tuntutan, di antaranya pelestarian Taman Gezi dan menolak pembangunan terhadap Taman Gezi, menghentikan tindak kekerasan aparat kepolisian, hak atas kebebasan berkumpul dan penuntutan pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan terhadap demonstran. Tidak hanya itu saja para demonstran juga mengangkat isu lain yang menuntut pemerintah Turki untuk mengakhiri privatisasi ruang publik, pantai, perairan, hutan, sungai, taman dan simbol-simbol kota lainnya kepada pihak swasta. Demonstrasi terus berlanjut sampai bulan Juli dan menurun dalam skala dan frekuensi yang lebih sedikit pada bulan Agustus. Namun pemerintah Turki menolak untuk mendengarkan tuntutan mereka dan tetap akan melanjutkan proyek tersebut (Precup, 2013).

Adapun profil para demonstran yang dihimpun dari laporan Lembaga penelitian Konda Research and Consultancy Turki, bahwa mayoritas pengunjuk rasa Taman Gezi didominasi 50% dari peserta demonstrasi berasal dari partisipan People's Republican Party (Partai Rakyat Republik/CHP) dan 30% merupakan non-partisan (dianggap sebagai orang-orang yang tidak menaruh kepercayaan pada lembaga-lembaga politik) sedangkan sisanya merupakan asosiasi dan aktivis terkait. Protes masih berlanjut pada bulan Agustus, dengan masa yang semakin banyak yang berujung demonstrasi anti-pemerintahan Erdogan, dengan 7.428 cedera dan 11 korban jiwa yaitu Mehmet Ayvalitas (20), Abdullah Comert (22), Ethem Sarisuluk (26), Irfan Tuna (47), Mustafa Sari (27), Selim Onder (88), Ali Ismail Korkmaz (19), Berkin Elvan (14), Serdar Kadakal (35), Ahmet Atakan (22) dan Zeynep Eryasar (55).

Hampir semua aktivitas ekonomi yang berada di wilayah Taksim Square, Gezi Park tidak beroperasi selama demonstrasi berlangsung dan salah satu area tersibuk di Istanbul tampak lumpuh total pada hari pertama demonstrasi dimulai hingga pertengahan bulan Juni. Tidak hanya akses perjalanan yang terganggu, para demonstran sulit mengakses internet. Pusat kawasan hiburan di Istanbul telah berubah menjadi medan perang selama berbulan-bulan, ketika pasukan keamanan melakukan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa. Menteri Dalam Negeri Muammer Guler mengatakan bahwa total 939 orang telah ditahan terkait 90 titik demonstrasi yang terjadi di 48 provinsi, termasuk Istanbul, Ankara, Izmir, Antalya, Konya dan lainnya.

Kedua, terjadi konflik antara pemerintah Turki dengan suku Kurdi yang berujung munculnya pemberontakan, ekstrimisme dan terorisme yaitu Partiyê Karkerên Kurdistan (Partai Pekerja Kurdistan/PKK) yang diklaim pemerintah Turki sebagai gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Turki. Mulanya konflik ini berasal dari terfragmentasinya suku Kurdi ke beberapa negara pada saat runtuhnya Kekaisaran Ottoman. Mayoritas dari suku Kurdi terdapat di negara-negara Timur Tengah, terutama di Iran, Irak, dan Turki, namun suku ini tidak termasuk dalam jajaran etnik Arab dengan bahasa yang berbeda pula dari bahasa Arab, yaitu bahasa Kurdi. Perbedaan keturunan antara suku Arab dan Kurdi inilah di negara-negara yang mereka diami yang seringkali menjadi pemantik konflik. Meskipun tidak termasuk dalam etnis Arab, akan tetapi suku Kurdi ini memainkan peran penting dalam sejarah perpolitikan di Timur Tengah. Perjalanan sejarah politik masa lalu, bisa dikatakan bangsa Kurdi termasuk bangsa yang kurang beruntung. Ironisnya, persoalan Kurdi sering kali diabaikan dan menempati kasta kelas bawah dalam heterogenitas masyarakat Arab.

Fakta-fakta diatas, menunjukkan bahwasanya sentimen identitas tersebut disambut dengan perlawanan oleh orang-orang Kurdi. Salah satu bentuk perlawanan mereka adalah dengan cara gerakan nasionalisme Kurdi. Perjanjian Sevres 1920 (Sevres adalah sebuah kota di Prancis) yang memberikan jaminan berdirinya sebuah negara Kurdistan Merdeka dalam kenyataannya tidak pernah terealisasi. Orang-orang Kurdi mempunyai sebuah cita-cita untuk mendirikan wilayah Kurdistan yang otonom, tempat mereka dapat mengatur diri mereka sendiri serta mempertahankan identitas dan sistem sosial budaya mereka. Inilah yang menjadi sumber utama dari konflik yang dikarenakan oleh kehadiran Suku Kurdi di negara-negara seperti Irak, Iran, dan Turki. Maka, setiap aktivitas dari suku Kurdi untuk memerdekakan diri selalu berakhir dengan penumpasan dan penindasan. Fakta bahwa wilayah Kurdistan berada di beberapa negara, menjadi kendala utama bagi terwujudnya sebuah negara Kurdistan Merdeka. Sementara wilayah Kurdistan sudah terintegrasi ke dalam negara-negara lainnya termasuk negara Turki (Sahide, 2013).

Kemudian atas permasalahan ini, Pemerintahan Perdana Menteri Erdogan melakukan operasi militer terhadap perlawanan rakyat Kurdi pada Februari 2008 ke basis milisi Kurdi di Pegunungan Qandil. Sedangkan pada 20 Juli 2015, konflik kembali meningkat ketika pemboman terjadi di Suruc yang diklaim PKK sebagai awal serangan yang akan terus dilakukan ke berbagai wilayah Turki lainnya. Pada 21 dan 23 Juli 2015, PKK membunuh 3 polisi Turki di provinsi Adiyaman dan Sanliurfa. Setelah momen ini, pemerintah Turki memutuskan untuk mengambil tindakan. Maka, pada tanggal 24 dan 25 Juli 2015, Turki melakukan Operasi Martir Yalcin (operasi militer). Antara 27 September 2015 hingga 5 November 2015, (Turk Silahlı Kuvvetleri/TSK) menghancurkan struktur pasukan PKK di provinsi Hakkari, sekitar 120 orang Kurdi meninggal dunia. Pada 10 Oktober 2015, seorang pelaku bom bunuh diri membunuh 103 jiwa dan 500 orang terluka dalam serangan teror tersebut.

Serangan dan teror terus terjadi, antara November 2015 hingga Februari 2016, bentrokan antara pasukan negara dan Milisi Kurdi meningkat menjadi skala yang lebih kuat lewat serangan udara dan serangan bom di Genuedydogu Anadolu Bolgesi (wilayah Tenggara) di Provinsi Anatolia Turki yang menyebabkan 466 korban jiwa. Masih berlanjut pada 17 Februari 2016, Teyrebazen Azadia Kurdistan (Organisasi Kebebasan Turki/TAK) membunuh 30 orang di ibukota Ankara dalam serangan bom mobil, sebagian besar dari mereka staf keamanan negara Turki. Pada 13 Maret 2016, sebuah bom mobil oleh TAK, membunuh 37 orang di Ankara. Pada bulan April hingga Mei 2016, personel keamanan Turki bahkan penjaga desa Kurdi di Degu Anadolu Bolgesi (wilayah Timur) terbunuh. Pada 25 Mei 2016, militan PKK mengklaim telah mundur dari distrik Nusaybin. Pada 7 Juni 2016, berbagai mayoritas Kurdi di wilayah tenggara dinyatakan aman ketika Perdana Menteri Yildirim dan Presiden Erdogan mengumumkan operasi militer telah selesai.

Tentunya kebijakan operasi militer tersebut memperkecil upaya untuk membangun dialog perdamaian antara Pemerintah Turki dan rakyat Kurdi. Sebagai akibatnya, negara ini telah berada dalam keadaan perang selama beberapa tahun. Perlawanan suku Kurdi semakin berkembang sebagai serangan teroris dan secara perlahan terus melakukan perlawanan bersama dengan kelompok afiliasi kurdi antara lain Teyrebazen Azadia Kurdistan (Organisasi Kebebasan Turki/TAK), Hezen Parastina Gel (Pasukan Pertahanan Rakyat/HPG), Koma Civaken Kurdistan (Unit Komunitas Kurdistan/KCK) dan Partiya Yekitiya Demokrat (Partai Persatuan Demokratik/PYD) di Suriah.

Ketiga, konflik antara dua kelompok besar (AKP-Erdogan dan Gulenist). Kedua kelompok ini masing-masing diwakili oleh kelompok yang dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan (Presiden Turki sekarang) dan kelompok Gulenist dipimpin oleh Fetullah Gulen dengan jaringan gerakan komunitas Fetullah Gulen, yang lebih biasa pengikut komunitas ini disebut Gulenist. Keduanya tumbuh dan bergerak dalam struktur negarasekuler yang dikembangkan oleh Mustafa Kemal Attaturk.

Namun, ada perbedaan penting antara keduanya. Erdogan memimpin partai politik, sementara Gulen menjalankan gerakan Islam Turki Sunni yang lebih tradisional, juga berafiliasi dengan pemikiran dan gerakan Said Nursi yang menentang Pemerintahan sekuler Turki pada awal abad ke 20. Dalam perjalanan untuk merubah Turki yang sekuler menjadi ke arah Islami, AKP dan Gulenist bekerja bersama. Hal ini disebabkan karena popularitas dan kekuatan gulenist yang moderat dan kuat, terutama dari segi finansial dan AKP-Erdogan yang memiliki basis massa besar dari kalangan konservatif.

Akar ketidakcocokan antara kedua kelompok mulai pada Juni 2010, ketika Gulen dan AKP tidak sepaham tentang persoalan flotilla, armada kecil yang bermaksud menembus blokade laut Gaza oleh Israel. Proyek untuk menembus blokade tersebut barasal dari organisasi kemanusiaan Turki IHH (Insan Hak ve Huriyetleri ve Insani Yardim Vakfi) yang bergerak dalam memberi bantuan diwilayah yang dilanda perang, gempa, kelaparan, dan konflik. Singkatnya, dalam perjalanan proyek tersebut 9 relawan tewas oleh serangan Israel. Lantas Erdogan menarik Duta Besar Turki di Tel Aviv, mengusir Duta Besar Israel dari Turki, menerapkan sanksi dan menghentikan semua kesepakatan militer dengan Israel. Sebaliknya Gulen mengecam tindakan pemerintah Turki dan sebaliknya, Gulen bersikap pro Israel, yang mengedepankan dialog antar iman atau interfaith dialogue (Kuncahyono, 2018).

Kemudian, konflik antara Turki dengan kelompok perlawanan Kurdistan juga merupakan persoalan lain yang menjadi perpecahan antara Gerakan Gulen dan AKP. Lagi, perbedaan pendekatan dalam menyelesaikan persoalan ketegangan, AKP bertindak keras tanpa kompromi perihal kelompok-kelompok yang melakukan perlawanan atas nama bangsa Kurdi, sedangkan Gerakan Gulen mengedepankan jalan perundingan dengan kelompok pemberontak Kurdi. Pada tanggal 12 Februari 2012, Kantor Kejaksaan Penuntut Umum yang berafiliasi dengan Gulen mengintrogasi Hakan Fidan, Kepala Badan Intelijen Nasional Turki (sekutu terdekat Erdogan), perihal perundingan perdamaian dengan pemberontak Kurdi. Di kacamata Erdogan, tindakan pihak kejaksaan tersebut berlebihan dan sudah diskenariokan oleh para simpatisan Gulen yang ada di tubuh kejaksaan. Menurut Erdogan, tindakan tersebut sebagai serangan personal kepada dirinya. Lantas pemerintah Turki mengambil tindakan dengan mengajukan RUU dan disahkan palemen pada 28 Februari 2014, untuk menyatakan bahwa semua sekolah swasta yang dikelola oleh Gerakan Gulen, sebagai lembaga yang tidak sah (Kuncahyono, 2018).

Selanjutnya, sebelum UU tersebut disahkan, pada tahun 2013 Erdogan sudah mulai menutup banyak sekolah di Turki. Tindakan tersebut memancing reaksi keras dari pihak Gulen. Sebulan kemudian, muncul kasus korupsi yang melibatkan 3 anak menteri termasuk anak dari Erdogan, Bilal Erdogan. Pembongkaran skandal kroupsi dilakukan oleh Financial Crime and battle Againts Criminal Incomes, Direktorat Keamanan Turki yang dilakukan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama, polisi menahan 47 orang dan menyita 17,5 juta dolar AS. Selain itu, beberapa pejabat ditahan, yaitu :

- Baris Guler (anak dari Kementerian Dalam Negeri Turki Muammer Guler)
- Kaan Caglayan (putra Menteri Ekonomi Zafer Caglayan)
- Oguz Bayraktar (putra dari Menteri Lingkungan Hidup dan Perencanaan Kota Erdogan Bayraktar)
- Mustafa Demir (walikota Distrik Kotapraja Fatih)
- Ali Agaoglu (pengusaha)
- Sulayman Aslan (General Managerr Halkbank)
- Reza Zarrab (pengusaha)

Pada tanggal 25 Desember 2013, pemerintah melakukan resuffle kabinet, 3 menteri mengundurkan diri, 10 menteri diganti. Pada saat itu juga dilakukan penyelidikan gelombang kedua. Dalam operasi ini jaksa mengungkapkan 41 orang termasuk

pengusaha yang dekat dengan Erdogan dan keluarganya, pengusaha asal Arab Saudi Yasin Al Qadi. Di pihak lain, pemerintah Turki melakukan perombakan birokrasi di lembaga kepolisian dengan memindahtugaskan kepala kepolisian yang melakukan investigasi kasus korupsi, mengganti kepala kepolisian di Ankara dan di Istanbul serta mempekerjakan kembali lebih dari 1000 kepala kepolisian dan perwira polisi yang sebelumnya dinonaktifkan (Kuncahyono, 2018).

Selanjutnya, penyelidikan terhadap kasus korupsi dihentikan, tanpa melalui proses persidangan. Akan tetapi, atas pengungkapan kasus korupsi tersebut, gerakan gulen mendapat banyak dampaknya. Sebab, Erdogan menyatakan bahwa ada 'negara paralel' di dalam pengadilan dan birokrasi yang berkonspirasi melawan pemerintahannya. Erdogan menilai bahwa gulenist adalah gerakan yang berupaya membentuk Pemerintahan di dalam negara (parallel state) yang berusaha menggulingkan pemerintahannya, terutama orang-orang yang ada di dalam birokrasi negara. Kasus korupsi inilah menjadi puncak sumber ketegangan antara Gulenists dan AKP. Pemerintah yang dipimpin AKP dengan keras membantah tuduhan korupsi, dan Erdogan mengklaim penangkapan itu sebagai upaya oleh jaksa, polisi dan hakim yang diyakini diinspirasi oleh gagasan-gagasan Gulen yang terhubung dengan gerakan Gulen untuk menggulingkan pemerintah. Pada akhirnya, para elit gulenist beranggapan bahwa Pemerintahan Erdogan adalah orang-orang yang tidak seharusnya menjadi mitra kerjasama.

Hingga April 2016, sebanyak 2.261 orang ditahan, 501 tersangka yang dipenjarakan berasal dari 48 provinsi. Di Ankara sebanyak 509 orang ditangkap dan 133 diantaranya ditahan. Sementara di Istanbul jumlah orang yang ditangkap adalah 264 orang dan 73 diantaranya ditahan. Di Izmir, total yang ditangkap 157 orang, sementara 61 orang ditahan. Di Provinsi Isparta sebanyak 47 orang dari 109 orang yang ditangkap, dipenjarakan. Orang-orang yang ditangkap berasal dari berbagai kalangan termasuk pengusaha, dokter, guru, akademisi, perwira polisi dan lainnya. Mereka semua dituduh menjadi anggota organisasi yang oleh pemerintah Turki memberi sebutan Fethullahçı Terör Örgütü (Fetullahist Terrorist Organization/FETO) atau Parallel State Structure (Kuncahyono, 2018). Tidak bisa dihindari bahwa adanya kesimpulan bahwa rangkaian peristiwa diatas adalah ungkapan dari konflik 2 kelompok besar yang memiliki pengaruh luas di Turki antara AKP-Erdogan dan Gulenist.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Teori Intervensi Militer oleh Perlmutter (1984), bahwa ada 2 (dua) kondisi yang memberikan kesempatan bagi militer untuk melakukan intervensi yaitu kondisi sosial dan politik. Suatu negara yang kondisi sosialnya lemah bersama dengan kondisi politik yang terfragmentasi, maka kepentingan kelompok akan tersebar dalam frekuensi yang tinggi. Kalau struktur negara lemah maka institusi-institusi politik tidak berfungsi efektif dan hal ini terjadi dengan negara Turki yang mana berdasarkan keterangan faktor-faktor kudeta di atas, kondisi sosial Turki selama beberapa tahun belakangan sebelum kudeta militer terjadi, secara umum sejak tahun 2013 sampai 2016 terus bergejolak yang mengakibatkan ketidakstabilan sosial dalam masyarakat.

Begitu juga menurut pandangan Nordlinger (1994), bahwa kudeta terjadi berdasarkan keadaan negara yang situasinya memburuk dari sektor politik, misalnya korupsi oleh pejabat negara, aktor-aktor separatisme dan lainnya. Kemudian, situasi tersebut diikuti dengan ketidakpercayaan lagi terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Dengan demikian kontrol sosial tidak efektif, maka militer memiliki peluang untuk melakukan intervensinya. Semua keadaan inilah yang telah mendorong pelaku kudeta yang mana pada peristiwa ini memancing pihak lain, baik oposisi ataupun militer untuk mengambil tindakan tegas dan sampai pada kesimpulan bahwa sudah tiba saatnya untuk menyelamatkan negara.

## 5.2. Faktor Historis

Faktor historis menjadi faktor penyebab kudeta yang digolongkan oleh Moore sebagai sebab kudeta kronik, yakni kudeta sebelumnya. Berdasarkan catatan riwayat kudeta yang terjadi di Turki sejak berdiri sebagai negara Republik, adalah cerminan dari ketegangan kekuasaan antara Kemalis dengan pemerintahan sipil yang dinilai oleh pihak militer telah keluar jalur daripada prinsip-prinsip Kemalis. Tampak pada tahun-tahun sebelumnya, faksi militer mengeluarkan E-memorandum yaitu sebuah pernyataan yang ditampilkan secara online melalui website resmi Angkatan Bersenjata Turki (Turk Silahlı Kuvvetleri/TSK) pada tanggal 24 April 2007, yang berkaitan dengan terpilihnya Abdullah Gul yang dipandang sebagai sosok anti-sekuler.

Sedikit berbeda dari pengalaman 4 (empat) kudeta sebelumnya, isu bahwa Turki akan kembali ke era Ottoman pada saat Pemerintahan Erdogan menjadi perhatian kalangan militer. Dalam deklarasi kudeta 2016 yang disiarkan secara ilegal melalui perusahaan penyiaran Radio dan Televisi Turki (TRT), tujuan kudeta adalah untuk memulihkan tatanan demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Para pelaku kudeta juga menyatakan ingin menghentikan negara dari otoritarianisme pemerintahan saat itu (dipimpin oleh Presiden Erdogan) yang mana diidentifikasi sebagai era neo-Otoman Baru (Islam). Sejak kemenangan AKP dan naiknya pamor Erdogan yang dianggap mewakili perasaan kaum muslim di Turki turut memberi andil bagi menurunnya dukungan terhadap Kemalisme terutama sekularismenya.

Militer yang mengidentifikasi lembaganya sebagai penjaga Kemalisme, sejak tahun 2002 mulai mengalami perubahan. Amandemen konstitusi dan beberapa perubahan hukum lainnya telah menurunkan kadar keterlibatan militer Turki didalam politik domestik dan menunjukkan usaha sipil untuk mendorong militer lepas dari politik praktis dan hanya mengurus urusan keamanan semata.

Presiden Erdogan dan kebijakan AKP saat itu dinilai otoriter oleh militer dengan melakukan pemecatan beberapa anggota militer dan pembatasan para jurnalis, akademis yang terindikasi sebagai simpatisan Gulen. Pemerintah Turki mengambil alih media, yang mengakibatkan hampir seluruh kontrol media dibawah pemerintah, termasuk media Zaman pada bulan Maret 2016 yang berafiliasi dengan Gulenist. Pelaku kudeta juga berjanji akan merebut pemerintahan dan segera menyusun konstitusi yang



baru serta mengembalikan prinsip-prinsip kemalis. Para pelaku kudeta percaya ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menghentikan dominasi Presiden Erdogan.

Sejalan dengan pernyataan Ozan O. Varol (2012), seorang peneliti hubungan sipil dan militer Turki bahwa kudeta militer dilancarkan sebagai respon sensitifnya sebagian pihak militer terhadap rezim yang kemudian hal inilah yang menggerakkan para pelaku kudeta untuk melancarkan kudeta dan merebut pemerintahan Erdogan saat itu. Tentunya pelaku kudeta telah mengidentifikasikan dirinya sebagai pihak yang pertama kali memberikan perlawanan ketika terdapat sesuatu yang dianggap berpotensi merubah tatanan negara sekuler Turki. Dari sini, dapat dikatakan konflik ideologis yang serius antara militer—yang secara tradisional militer menganggap sebagai penjamin sifat sekuler negara Turki—dan AKP-Erdogan yang berkuasa. Slogan ‘setiap orang Turki terlahir sebagai militer’, benar-benar dijiwai dan merasuk dalam militer. Slogan tersebut merepresentasikan filosofi militerisme di Turki. Seperti yang dikatakan ahli hubungan sipil-militer Turki, Burak B. Ozpek (2014):

*“Jika seorang warga negara memaki identitas warga negara Turki, maka ia semestinya secara otomatis menerima peranan militernya di masyarakat. Dengan kata lain, penolakan menjadi seorang tentara sama artinya menolak identitas Turki. Karena itu, adalah tidak salah argumen bahwa komitmen tanpa syarat bagi militer dibutuhkan bagi seseorang untuk menunjukkan kesetiannya pada identitas Turki dan negara Turki”*

Sudah ada peraturan dalam UU Internal Militer menyiratkan bahwa militer berada di luar panggung politik. Akan tetapi militer meyakini bahwa mereka adalah penjaga prinsip-prinsip Kemalis. Walaupun berbagai sumber mengklaim bahwa Kemalism telah tenggelam, namun tidak menutup kemungkinan adanya faksi kecil yang masih bertahan dalam Pemerintahan Erdogan, terutama di lembaga militer. Kemudian, prinsip inilah yang menjadi dalih elit militer berhasil melakukan kudeta-kudeta sebelumnya di tahun 1960, 1971, 1980 dan 1997. Rumusan Moore yang meyakinkan bahwa kudeta sering menimbulkan kudeta lainnya ini terjadi oleh negara Turki. Alasannya adalah faktor-faktor yang menjurus ke arah kudeta akan tetap bertahan dan memberikan kemungkinan bagi terjadinya kudeta selanjutnya. Ditambah dengan sejarah bangsa Turki yang memang dibentuk dan berdampingan bersama dengan tatanan politik dan militer warisan Ottoman.

## 6. Penutup

Berdasarkan analisis diatas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ada 2 faktor yang melatarbelakangi peristiwa kudeta militer Turki tahun 2016 yaitu:

- Faktor Krisis Sosial-Politik Domestik sebelum kudeta, yang meliputi : gelombang demonstrasi The Gezi Park Protester Maret-Agustus 2013, konflik antara pemerintah Turki dengan suku Kurdi yang memuncak pada tahun 2015 hingga Juli 2016, dan konflik antara dua kelompok besar antara AKP-Erdogan (Presiden Turki sekarang) dan Gulenist yang dipimpin oleh Fetullah Gulen. Sampai pada puncak konflik keduanya yaitu klaim pemerintah Erdogan terhadap Gerakan Gulen sebagai Paralel State yang berniat menggulingkan pemerintahan.
- Faktor historis, yaitu pengaruh dari peristiwa kudeta yang telah dialami sebelumnya. Alasannya adalah faktor-faktor yang mengarah ke kudeta akan tetap bertahan dan memberikan kemungkinan bagi terjadinya kudeta selanjutnya. Juga, doktrin bahwa klaim militer sebagai penjaga prinsip-prinsip negara Kemalis yang sudah ada jauh sejak negara modern Turki berdiri. Ditambah dengan sejarah bangsa Turki yang memang dibentuk dan berdampingan bersama dengan tatanan politik dan militer warisan Ottoman yang sudah terdoktrin sebagai lembaga penjaga prinsip kemalis warisan Mustafa Kemal Attaturk.

Sederhananya, Turki mengalami krisis secara sosial beriringan dengan krisis secara politik, memberi peluang kepada pihak militer melakukan kudeta sebagai respon sensitifnya sebagian pihak militer terhadap rezim Erdogan. Tentunya pelaku kudeta telah mengidentifikasikan dirinya sebagai pihak yang pertama kali memberikan perlawanan ketika terdapat sesuatu yang dianggap berpotensi merubah tatanan negara sekuler Turki.

## Referensi

- [1] Aesthetics of Protest. (2013). “Visual Culture And Communication in Gezi Park”. Tersedia di <https://www.aestheticsofprotest.com/gezi-park/> diakses 5 Oktober 2019.
- [2] Alfian, Alfian. (2018) “Militer dan Politik di Turki: Dinamika Politik Pasca AKP Hingga Gagalnya Kudeta”. Bekasi Penjuru Ilmu.
- [3] Andra, Precup. (2013) “Media Bias and the Gezi Park Protests”. Tersedia di [https://www.academia.edu/34649355/The\\_Gezi\\_Park\\_Protests](https://www.academia.edu/34649355/The_Gezi_Park_Protests) diakses 20 Juli 2019.
- [4] Breuning, Jhon T. Ishiyama dan Marijke. (2013) “Ilmu Politik dalam Paradigma Abad ke-21: Sebuah Referensi Panduan Tematis Jilid 1.” Jakarta: Kencana.
- [5] Hurriyet Daily News (2013) “Police Withdraw from Taksim after Violent Crackdown as Protesters Remain Defiant on 5th Day”. Tersedia di <http://www.hurriyetaidailynews.com/police-withdraw-from-taksim-after-violent-crackdown-as-protesters-remain-defiant-on-5th-day-48009> diakses 5 Oktober 2019.
- [6] Hurriyet Daily News (2013) “Timeline of Gezi Park protests”. Tersedia di <http://www.hurriyetaidailynews.com/timeline-of-gezi-park-protests--48321> diakses 5 Oktober 2019.
- [7] Institute For Security and Development Policy (ISDP). (2016). “Turkey's Kurdish Conflict: 2015-Present”. Tersedia di <http://isdp.eu/content/uploads/2016/12/2016-Turkeys-Kurdish-Conflict-2015-Present.pdf> diakses 1 September 2019.
- [8] Konda Gezi Report. (2014). “Public perception of the ‘Gezi protests’ Who were the people at Gezi Park?”. Tersedia di [http://konda.com.tr/wp-content/uploads/2017/03/KONDA\\_Gezi\\_Report.pdf](http://konda.com.tr/wp-content/uploads/2017/03/KONDA_Gezi_Report.pdf) diakses 20 Agustus 2019.
- [9] Kuncahyono, Trias. (2018) “Turki: Revolusi Tak Pernah Henti.” Jakarta: Kompas.
- [10] Merelli. (2016) “A Brief History of Recent Military Coups in Turkey 2016”. Tersedia di <https://qz.com/733811/turkey-coup-a-brief-history/> diakses 17

Maret 2019.

- [11] Rofiq, Muhamad. (2016). "Democracy and the Armed Forces: Lessons from the Coups of Egypt in 2013 and Turkey in 2016". *Jurnal Hubungan Internasional Vol. 5 Edisi 2 / Oktober 2016-Maret 2017*. Tersedia di <https://doi.org/10.18196/hi.5292> diakses 17 Maret 2019.
- [12] Sahide, Ahmad. (2013). "Suku Kurdi dan Potensi Konflik di Timur Tengah". *Jurnal Hubungan Internasional Vol. 2 No. 2 / Oktober 2013*. Tersedia di <http://www.neliti.com/publications/81641/suku-kurdi-dan-potensi-konflik-di-timur-tengah> diakses 17 April 2019.
- [13] US House Subcommite on Europe. (2013). "Opening Statement : Eurasia and Emerging Threats Hearing on Turkey at a Crossroads: What do the Gezi Park Protests Mean for Democracy in the Region?" Tersedia di <https://docs.house.gov/meetings/FA/FA14/20130626/101051/HHRG-113-FA14-20130626-SD001.pdf> diakses 5 Oktober 2019.